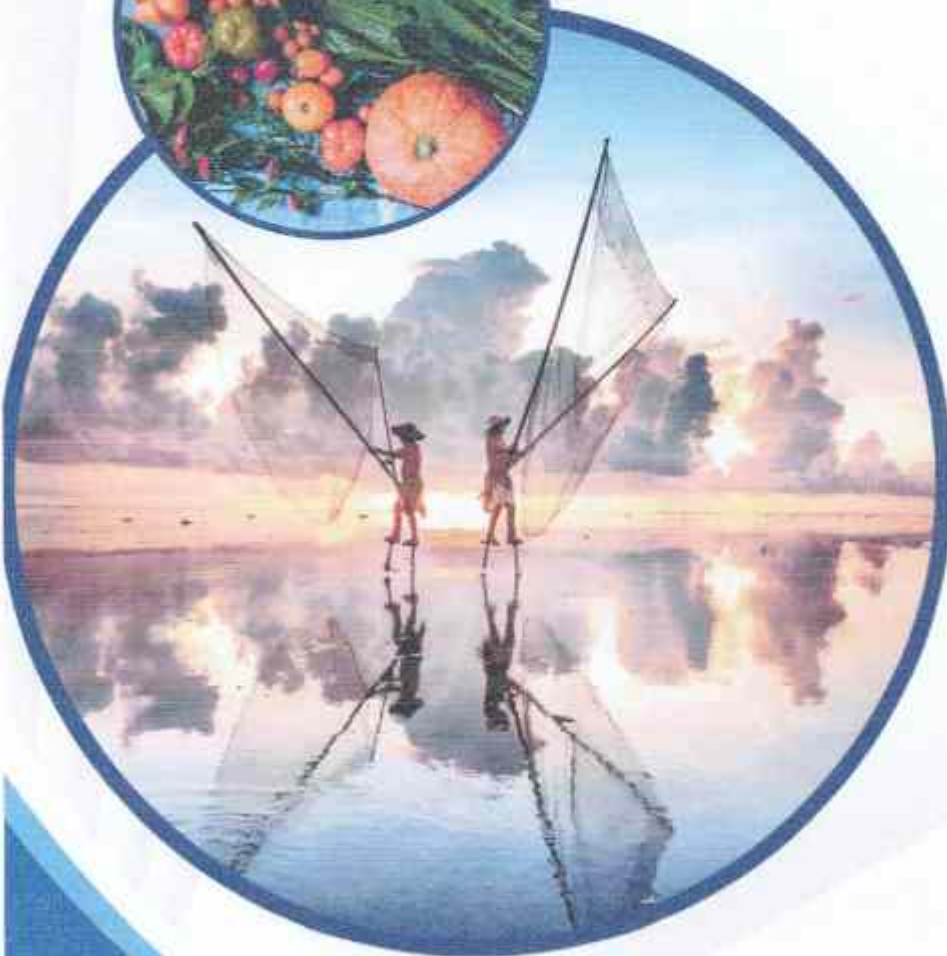




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

RENCANA KERJA TAHUN 2025



DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT karena dengan rahmatNya, Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja Tahun 2025 ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan bidang Pangan Kabupaten Pesisir Selatan selama satu tahun Dengan harapan agar program dan kegiatan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan lebih terarah dan terukur.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025 yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Semoga Renja ini memberikan informasi bagi para pemangku kepentingan, baik dari unsur aparatur pemerintah yang terkait, maupun masyarakat sebagai mitra kerja, serta bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Painan, 8 Juli 2024
**Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan**

FIRDAUS, S.Pi. M.Si
NIP. 19700621 199303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	9
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .	14
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan dan Pangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan	37
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Pangan	42
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	43
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan	52
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	57
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	57
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dkina sPerikanan dan Pangan	61
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	62
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN .	72
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan dan Pangan	72
BAB V PENUTUP	78
5.1 Kaidah Pelaksanaan	78
5.2 Rencana Tindaklanjut	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan dan Pangan, Pencapaian Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Sampai Dengan Tahun 2024	28
Tabel 2.2	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perikanan dan Pangan	38
Tabel 2.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Pangan	38
Tabel 2.4	Target Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perikanan dan Pangan	39
Tabel 2.5	Target Produksi Perikanan	39
Tabel 2.6	Target Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	39
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	41
Tabel 2.8	Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	44
Tabel 2.9	Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2025 Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	52
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran Renja Dinas Perikanan dan Pangan	62
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	64
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	72

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Bupati Pesisir Selatan. Program dan kegiatan dalam rancangan Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan Rancangan Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Penyusunan rancangan Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan tanggung jawab Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang proses penyusunannya mengacu pada rancangan awal RKPD, untuk itu Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan membentuk tim penyusun Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang bertugas melaksanakan seluruh proses penyusunan dokumen Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan penyusunan RKA-Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan rasionalisasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, untuk menyelaraskan target kinerja antara Rasionalisasi RPJMD Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 maka dilakukan rasionalisasi terhadap target kinerja pada Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Rasionalisasi dilakukan terutama pada BAB IV yang berhubungan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dan BAB VII terkait dengan cascading Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan rancangan Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
3. Substansi rancangan Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan pilihan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Renstra, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu, rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju;
4. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan didasarkan atas pertimbangan urusan pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
5. Program/kegiatan dalam RKPD Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk Tahun n dan Tahun $n+1$;
7. Dibentuknya forum OPD sebagai forum diskusi, tidak hanya ditujukan untuk pembahasan program dan kegiatan Tahunan saja, melainkan juga sebagai sarana diskusi dalam pembahasan berbagai persoalan pembangunan yang terkait dengan bidang OPD masing-masing. Untuk itu pemilihan peserta forum OPD harus yang betul-betul memiliki komitmen, serta sesuai dengan kapasitas dan kompetensi menurut bidangnya;

8. Rancangan Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan selesai disusun dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Bappedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Program dan kegiatan di dalam Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang diusulkan untuk didanai melalui APBD Provinsi dan APBN, dan/atau usulan program/ kegiatan dan DAK. Tembusannya disampaikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat kepada Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat melakukan pengkajian terhadap usulan program/kegiatan yang disampaikan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya dibahas bersama OPD-OPD kabupaten/kota tersebut dalam forum OPD Provinsi untuk menentukan kesepakatan prioritas terhadap program/kegiatan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi dan/atau APBN.

Mengingat pentingnya peranan Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Tahunan dan sebagai pedoman penyusunan RAPBD dengan maksud dan tujuan untuk menjamin kualitas proses penyusunan dan kualitas substansi dokumen ini benar-benar memenuhi pendekatan perencanaan serta efektif dan responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dan diharapkan dapat memenuhi ketentuan tentang sistem, prosedur, dan berkontribusi signifikan dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan secara berkelanjutan.

Kegiatan penyusunan rancangan Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilakukan sebelum Rancangan Awal RKPD diterima, atau segera setelah RAPBD Tahun sebelumnya disahkan menjadi APBD (awal Desember). Proses penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

A) Langkah-langkah pada Kegiatan Persiapan mencakup:

1. Melakukan identifikasi para pemangku kepentingan

Identifikasi dan seleksi para pemangku kepentingan yang akan dilibatkan sebagai peserta forum OPD, dan/atau yang akan dipilih sebagai anggota Tim Penyusun Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, mencakup individu ataupun lembaga yang dinilai kompeten, relevan, dan representatif. Jika kegiatan ini telah dilakukan pada waktu penyusunan Renja Tahun sebelumnya, maka pada langkah ini cukup mereview dan melakukan perubahan yang diperlukan berdasarkan masukan tahun sebelumnya.

2. Pembentukan Tim Penyusun Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Pada langkah ini telah dilakukan pembentukan Tim Penyusun Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, selain membentuk Tim Penyusun Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan disarankan pula untuk menetapkan fasilitator untuk membantu proses pelaksanaan perencanaan partisipatif yang efektif dan efisien. Tim yang dibentuk diusahakan melibatkan anggota dari unsur LSM yang memiliki kompetensi dan komitmen. Tim penyusun Perubahan Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dibentuk untuk masa waktu beberapa tahun, dan dapat juga sekaligus dirangkap/merangkap Tim penyusun Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Jika tim telah terbentuk pada tahun sebelumnya, maka jika diperlukan dapat direview kembali.

3. Penyiapan Kelembagaan Forum OPD

Pada langkah ini dilakukan penyiapan kelembagaan forum OPD yang pesertanya merupakan perwakilan para pemangku kepentingan yang memiliki relevansi dan kompetensi khusus serta punya komitmen dengan OPD yang bersangkutan. Jika kelembagaan forum OPD ini sudah terbentuk, maka tinggal dilanjutkan. Pelaksanaan forum OPD telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024.

4. Pengisian Formulir (Isian)

Pada langkah ini Tim Penyusun Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan konfirmasi terhadap formulir isian/matrik yang disampaikan oleh Kepala Daerah tentang usulan program dan kegiatan yang diajukan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun sebelumnya dalam rangka prakiraan maju serta menyerahkan formulir isian yang telah dilengkapi dan telah direview kepada Bappedalitbang.

5. Penyusunan Rencana Kerja Tim untuk Penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Tim Penyusun Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan menyusun rencana kerja untuk penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan serta menyiapkan outline atau daftar isi Perubahan Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan lampiran berupa format kegiatan yang akan dianggarkan. Format kegiatan yang akan dianggarkan tersebut menggunakan format sesuai ketentuan yang diatur dalam **PERMENDAGRI Nomor 86/2017**.

6. Kompilasi Informasi/Konsultasi dengan Kementrian/Lembaga (K/L) Terkait

Tim Penyusun Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan meminta/mengumpulkan informasi atau berkonsultasi dengan K/L sehubungan dengan rancangan Renja K/L untuk bidang/sector terkait diprovinsi dan kabupaten/kota.

7. Kompilasi Informasi/Konsultasi dengan Provinsi Terkait

Tim Penyusun Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan meminta/mengumpulkan informasi atau berkonsultasi sehubungan dengan rancangan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat untuk bidang/sector terkait.

B) Analisis dan Pengkajian Dokumen

Merupakan kegiatan pengkajian terhadap dokumen program/ kegiatan yang terkait langsung dengan penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka koordinasi dan sinergi program/kegiatan Dinas Perikanan dan

Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan dapat dilaksanakan sebelum rancangan awal RKPD diterima. Pada kegiatan analisis dan pengkajian dokumen ini mencakup:

1. Melakukan kajian terhadap Rancangan Awal RKP Nasional (dan RKPD Provinsi)
Langkah ini dimaksudkan untuk melihat arahan dan prioritas program/kegiatan yang terkait Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Review RPJM Nasional dan RPJM Provinsi
Melakukan identifikasi arahan dan prioritas RPJM Nasional untuk diakomodasikan dalam penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dan Renja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat. Untuk Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan juga perlu mengidentifikasi arahan dan prioritas RPJM Provinsi atau dari Renja Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dan Renja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat tahun yang direncanakan (jika telah disusun), untuk diakomodasikan dan disinergikan dalam penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Jika belum diperoleh informasi untuk tahun yang direncanakan, maka dapat diidentifikasi dari RKP/RKPD Provinsi tahun lalu.
3. Kajian terhadap RPJM Daerah dan Renstra OPD
Melakukan evaluasi status capaian kinerja penyelenggaraan urusan pilihan terhadap RPJM Daerah dan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun rencana, sesuai tupoksi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mencapai sasaran hasil pembangunan tahun rencana
4. Kajian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
Melakukan kajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun lalu dan tahun berjalan, evaluasi pencapaian SPM serta review terhadap kebutuhan program dan kegiatan yang diusulkan tahun sebelumnya dalam rangka prakiraan maju pada program/kegiatan ($n + 1$)
5. Meminta/menerima Rancangan Awal RKPD secara resmi dari Bapedalitbang.

- C) Kegiatan Penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
- Kegiatan ini dilaksanakan setelah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan menerima secara resmi dokumen Rancangan Awal RKPD dari Bapedalitbang. Langkah-langkah pada kegiatan penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan mencakup:
1. Mengidentifikasi realisasi target capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun lalu dan dibandingkan terhadap sasaran dan target Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dan RPJMD pada tahun bersangkutan;
 2. Merumuskan program/kegiatan pelayanan pilihan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai skala prioritasnya untuk pencapaian sasaran dan target Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan maupun RPJMD;
 3. Mengkaji rancangan awal RKPD program/kegiatan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan dan lakukan pengecekan apakah program/kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sudah termuat dalam rancangan awal RKPD. Jika belum termuat, maka perlu diberi catatan penting pada rancangan awal tersebut;
 4. Mengidentifikasi program dan kegiatan RKPD yang bersifat lintas OPD dan memerlukan koordinasi dalam penyusunan program dan kegiatan;
 5. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan ke dalam rancangan Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan,
 6. Merumuskan perubahan atau revisi atas program dan kegiatan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang tertulis dalam RKPD dengan merinci tambahan atau koreksi terhadap rencana kegiatan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang tercantum dalam rancangan awal RKPD;
 7. Menyiapkan Forum OPD atau Forum Gabungan OPD untuk mendapatkan kesepakatan susunan prioritas kegiatan dan program dalam format rencana kerja RKPD bagi setiap OPD. Dalam keadaan terdapat kegiatan usulan

masyarakat yang mendesak dan tidak atau belum termasuk dalam salah satu program dan kegiatan RKPD yang sudah dirancang maka Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan menambahkan program dan kegiatan tambahan ke dalam Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah dirancang tersebut. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan besaran pagu indikatif Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang ditentukan dalam rancangan awal RKPD;

8. Merumuskan kembali usulan program dan kegiatan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun yang direncanakan dalam bentuk rancangan Perubahan Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, dengan memperhatikan prioritas daerah, kesinambungan program dan kegiatan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan serta pagu indikatif yang telah dicanangkan dalam rancangan awal RKPD. Format usulan memperhatikan format RKA Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Rancangan Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan memuat hasil identifikasi program dan kegiatan, dirinci menurut kecamatan, dan nagari serta perkiraan alokasi sumber pendanaan dari APBD kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya;
10. Rancangan Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan juga memuat hasil identifikasi program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang berasal dari RPJM Provinsi dan/atau dari Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, dan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat yang berasal dari RPJM Provinsi dan/atau dari Renja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun rencana atau dari prakiraan maju APBD Provinsi tahun sebelumnya; dan
11. Tembusan rancangan Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan disampaikan kepada OPD Provinsi dan Kementerian/Lembaga terkait, khususnya daftar program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditangani dan/atau dibiayai provinsi dan pemerintah pusat melalui dana APBN (dana

dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, DAK dan Dana Otsus), dan/atau APBD Provinsi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

- m. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Propinsi (RZWP3K) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038.
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2022;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
- t. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian
- u. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, dan;
- v. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2025 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah bidang perikanan dan pangan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Renja Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2025 disusun bertujuan :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam rencana operasional Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Sebagai acuan bagi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
- c. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- d. Menjadikannya sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan secara partisipatif dalam berbagai forum yang sesuai dengan konstitusi;
- e. Merumuskan gambaran umum langkah operasional Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan melalui program dan kegiatan bidang Perikanan dan Pangan;
- f. Menjadikannya sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran (TA) 2025;
- g. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian capaian kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- h. Mewujudkan konsistensi atas sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Renstra dan hasil Musrenbang RKPD dalam mengaplikasikan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana kerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2025, berisi latar belakang, landasan hukum yang mendasari, maksud dan tujuan penyusunan Renja PD, serta sistematika penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini berisi tentang evaluasi program kegiatan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023, dan realisasi Renstra PD dibandingkan dengan target dalam renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026, analisis kinerja pelayanan sesuai dengan tupoksi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, isu-isu penting terkait tugas dan fungsi PD, review terhadap rumusan hasil musrenbang RKPD serta penelaahan usulan program kegiatan dan kegiatan masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang telaahan terhadap kebijakan pemerintah atasan, telaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD, tujuan dan sasaran Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang telaahan terhadap kebijakan pemerintah atasan, telaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD, tujuan dan sasaran Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025.

BAB V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan dan Pangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi terhadap Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan untuk mengkaji hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dibandingkan dengan capaian target kinerja renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Secara umum dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2023 ini sudah baik yaitu mencapai 92,17% sebesar **Rp. 14.977.977.559,-** terealisasi sebesar **Rp. 13.804.768.606,-** dan fisik sebesar 99,40%, dilihat dari target kinerja yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja baik itu pejabat eselon II dengan Bupati Pesisir Selatan, Pejabat Eselon III dengan Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional Penyetaraan dengan Pejabat Eselon III dan sampai staf/pelaksana sudah **"Baik"** namun demikian ada beberapa fisik kegiatan yang realisasi fisik belum 100% dikarenakan faktor pelaksanaan kegiatan dianggarkan pada perubahan anggaran tahun 2023 dengan waktu pelaksanaan kegiatan sangat singkat.

Dibawah dapat dilihat realisasi program/kegiatan Tahun 2023 sebagai berikut :

A. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Tahun 2023, semua kegiatan terlaksana sesuai target kinerja yang telah direncanakan.

B. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan 7 Program, 15 kegiatan dan 35 Sub Kegiatan dengan Total Pagu Anggaran sebesar **Rp. 14.977,977.559,-** dan Realisasi sebesar **Rp.13.804.768.606,- (92,17 %)**.

Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan mendukung tercapainya Perencanaan dan Penganggaran yang betul dan Valid pada Dinas Perikanan dan Pangan. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 43.015.790,- dengan realisasi anggaran Rp. 42.841.708,- Pada kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan Yaitu : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Pagu anggaran ini Rp. 43.015.790,- dengan realisasi anggaran Rp. 42.841.708,-.

Dalam sub kegiatan pelaksanaan ini adalah lembur dalam pembuatan dokumen Renstra, Renja dan RKA serta koordinasi ke Propinsi.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan mendukung tercapainya tertib administrasi keuangan pada Dinas Perikanan dan Pangan. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 3.769.485.510,- dengan realisasi anggaran Rp. 3.659.993.226,-. Pada kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan Yaitu :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sasaran sub kegiatan ini adalah tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi ASN selama 12 bulan Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 3.611.307.702,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.505.442.579,- (97,07 %) , hambatan dan kendala tidak ada.

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sasaran sub kegiatan ini adalah tertib administrasi pelaksanaan tugas ASN selama 12 bulan Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 151.165.888,- dengan realisasi sebesar Rp. 147.646.307,- (97,67 %), hambatan dan kendala tidak ada.

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sasaran sub kegiatan ini adalah Tercapainya Laporan Akhir Tahun yang betul Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 7.011.920,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.904.340,- (98,47 %).

Pelaksanaan kegiatan berupa lembur dalam rangka mempersiapkan bahan permintaan BPK dan Pembuatan Laporan Akhir Tahun keuangan (CALK), hambatan dan kendala tidak ada.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan mendukung tercapainya tertib administrasi kegiatan pada Dinas Perikanan dan Pangan .Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 428.803.895,- dengan realisasi anggaran Rp . 414.958.471,- . Kegiatan ini terdiri dari 7 Sub Kegiatan Yaitu :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sasaran sub kegiatan ini adalah tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selama 12 bulan, Pagu Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 10.701.843,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.626.769,- (99,30%) , hambatan dan kendala tidak ada.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sasaran sub kegiatan ini adalah tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor, yaitu 1 (satu) unit Printer, 1 Unit PC dengan Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.22.476.290,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.370.000,- (86,18 %) hambatan dan kendala tidak ada.

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sasaran sub kegiatan ini adalah tersedianya Bahan Alat Tulis Kantor dan Logistik lainnya selama 12 bulan Pagu Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 45.964.635,- dengan realisasi sebesar Rp. 45.843.004,- atau 99,74 % , hambatan dan kendala tidak ada.

d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sasaran sub kegiatan ini adalah tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan selama 12 bulan, Pagu Anggaran Sub kegiatan ini sebesar Rp. 29.400.627,- dengan realisasi sebesar Rp. 29.325.275,- (99,74 %) , hambatan dan kendala tidak ada.

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sasaran sub kegiatan ini adalah tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan selama 12 bulan, Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 5.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.014.000,- (74.33 %), hambatan dan kendala tidak ada.

f. Fasilitas Kunjungan Tamu

Sasaran sub kegiatan ini adalah tersedianya Makanan dan Minuman untuk tamu dari pusat maupun dari Propinsi selama 12 bulan, Pagu Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.160.000,- (98,18 %), hambatan dan kendala tidak ada.

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sasaran sub kegiatan ini adalah terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD selama 12 bulan, Pagu Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 312.660.500- dengan realisasi sebesar Rp. 303.619.423,- (97,11 %), hambatan dan kendala tidak ada.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini bertujuan tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah seperti Listrik, Air dan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 266.935.959,- dengan realisasi anggaran Rp. 250.934.382,-. Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan Yaitu :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Sasaran sub kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 bulan Pagu Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 108.150.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 93.603.503,- (86,55 %) , hambatan dan kendala tidak ada.

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sasaran sub kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Kebersihan Kantor selama 12 bulan Pagu Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 158.785.959,- dengan realisasi sebesar Rp. 157.330.879,- (99,08 %) , hambatan dan kendala tidak ada.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tujuan dari Kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana yang ada di Dinas Perikanan dan Pangan selama 12 bulan sehingga memiliki umur ekonomis diatas rata-rata. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 380.296.305,- dengan realisasi anggaran Rp. 314.544.843,- Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Sub Kegiatan ini bertujuan agar terpeliharanya kendaraan dinas baik perorangan maupun Jabatan untuk mendukung seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Perikanan dan Pangan, Pagu anggaran Sub Kegiatan ini Rp. 57.046.150,- dengan realisasi anggaran Rp. 48.676.614,- atau (85.33 %.) hambatan dan kendala tidak ada.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Sub Kegiatan ini bertujuan agar terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional untuk mendukung seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Perikanan dan Pangan, Pagu anggaran Sub Kegiatan ini Rp. 233.950.155,- dengan realisasi anggaran Rp. 178.229.229,- atau (76,18 %.) hambatan dan kendala Karena untuk membeli suku cadang harus pakai e-katalog, sedangkan suku cadang tersebut ada di luar Kab. Pesisir Selatan, solusi kita harus membuat Telaah Staf.

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan ini bertujuan agar terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor untuk mendukung seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Perikanan dan Pangan, Pagu anggaran Kegiatan ini Rp. 21.900.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 21.800.000,- (99,54 %). Hambatan dan kendala tidak ada.

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan ini bertujuan agar menambah nilai aset bangunan dan terpeliharanya gedung kantor Dinas Perikanan dan Pangan yaitu berupa rehab Kantor. Pagu anggaran sub Kegiatan ini Rp. 67.400.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 65.839.000,- (97,68 %), hambatan dan kendala tidak ada.

II. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini bertujuan untuk mengembangkan teknologi dan informasi pengelolaan potensi perikanan tangkap yang ada di Pesisir Selatan sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktifitas usaha perikanan tangkap serta kesejahteraan nelayan. Untuk mencapai tujuan program tersebut, program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp.5.731.273.922,- dengan realisasi Rp. 5.236.185.649 dan didukung 1 (satu) kegiatan berikut ini:

1. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan Skala Kecil Perikanan ini juga penentu dalam peningkatan Produksi Perikanan sebab tanpa didukung oleh sarana prasarna yang cukup maka dapat mempengaruhi Produksi Perikanan. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.731.273.922,- dengan realisasi Rp. 5.236.185.649,- dan didukung 2 (dua) Sub kegiatan berikut ini:

a. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil.

Sub Kegiatan ini bertujuan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang bersumber dari Dana DAK dan APBD/APBD-P Pagu anggaran

sub Kegiatan ini Rp. 5.706.273.997,- dengan realisasi anggaran Rp. 5.235.202.249,- atau 91,74 %, rincian pelaksanaan :

1. Sumber Dana DAK

- Pengadaan Perahu Jukung 14 Paket
- Pengadaan Mesin 15 PK 24 Paket
- Pengadaan Alat Penangkap Ikan 122 Paket

2. Sumber Dana APBDP

- Pengadaan Mesin Tempel 15 PK 26 Unit
- Pengadaan Mesin Tempel 40 PK 20 Unit
- Pengadaan Mesin Long Tail 13 Unit
- Pengadaan Jaring Millenium 57 Piece
- Pengadaan Komputer (PC) 2 Unit
- Pengadaan Printer 3 Unit
- Pengadaan GPS 3 Unit
- Pengadaan AC 1 unit
- Scanner 1 Unit

b. Pelaksanaan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk Pelayanan TPI Pagu Anggaran Sub kegiatan ini sebesar Rp. 24.999.925,- dan terealisasi sebesar Rp. 983.400,- atau 3,93 %. Hambatan dan kendala realisasi kecil karena sertifikasi tanah tidak bisa terlaksanan karena lokasi yang direncanakan tidak sesuai secara teknis.

III. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya baik diperairan umum atau kolam, Pagu anggaran ini bersumber dari Dana DAK yakni sebesar Rp. 1.728.272.760,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.559.543.420,- yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan Budidaya, yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan.

a. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yang bertujuan Meningkatkan Produksi Perikanan, Pendapatan dan Kesejahteraan Kelompok Pembudidaya, Pagu Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 1.728.272.760,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.559.543.420,- atau 90.24 %.

Pelaksanaan kegiatan ini dengan rincian

a. Sumber Dana DAK

- Belana Modal Alat Pengujian Kualitas Air 1 Unit
- Pengadaan Calon Induk Unggul Ikan Lele Betina 56 ekor dan jantan 50 ekor.
- Pengadaan Pakan Calon Induk Unggul Ikan 1.990 Kg
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Nila : 3 Paket
- Pengadaan sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Lele : 3 Paket
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Gurame : 12 Paket

IV. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Ketersediaan Pangan, sehingga cukup memenuhi kebutuhan pangan. Pagu Anggaran program ini sebesar Rp. 170.000.019,- dengan realisasi sebesar Rp. 159.495.512,-. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan :

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan.

a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan

Pagu Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 24.999.970,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.368.170,- atau 89.47 %.

Kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini pencatatan harga pasar untuk menyusun Neraca Bahan Makanan (NBM), Hambatan dan Kendala tidak ada.

- b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya.

Pagu Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 55.000.176,- dengan realisasi sebesar Rp. 50.605.392,- atau 92,01 %, Hambatan dan Kendala tidak ada.

2. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan

- a. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memanfaatkan pekarangan sehingga menghasilkan keanekaragaman Pangan sehingga dapat menambah pendapatan keluarga. Pagu Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 89.999.873,- dengan realisasi sebesar Rp. 86.524.950,- atau 96,14 %, Pelaksanaan pada Sub kegiatan ini berupa :

1. memfasilitasi bantuan hibah kegiatan Pengembangan KRPL untuk kelompok Wanita Tani (KWT) pada 6 Kecamatan yang berasal dari dana APBD Propinsi.
2. Melaksanakan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman untuk pencegahan dan penurunan stunting
3. Sosialisasi Gerakan Sadar Pangan B2SA.

Hambatan dan Kendala tidak ada.

V. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini bertujuan untuk menyediakan pangan bagi masyarakat miskin yg terkena rawan pangan transien sehingga menjamin pasokan pangan yang stabil. Pagu Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 294.999.576,- dengan Realisasi sebesar Rp. 240.448.355,-. Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Kecamatan.

kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan

a. Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanaan Pangan

Sub kegiatan ini bertujuan ketersediaan Informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif dan tertata dengan baik. Pagu Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 36.999.820,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 29.908.295,- atau 80,83 %, keluaran dari sub kegiatan ini adalah Dokumen Peta Ketahanan Pangan (FSVA), Hambatan dan Kendala Tidak Ada.

2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/kota.

terdiri dari 2 Sub Kegiatan

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi dampak kerawanan pangan pada balita stunting dan ibu menyusui, Pagu Anggaran Pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 95.999.926 ,- dengan Realisasi Sebesar Rp. 88.930.555,- atau 92,64 %. Pada Sub Kegiatan ini pelaksanaan kegiatan penyediaan Bahan Baku Persediaan Penanganan Balita Gizi Buruk dan Stunting berupa bantuan paket sembako untuk 30 orang balita, dengan rincian Bantuan:

- a) Beras : 30 org x 10 Kg = 300 kg
- b) Telur : 30 org x 6 tray = 180 Kray
- c) Minyak Goreng : 30 org x 9 Kg =270 Kg

- d) Gula : 30 org x 3 kg = 90 Kg
 - e) Kacang Hijau : 30 org x 10 Kg = 300
 - b. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup 1(satu) daerah Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan dan menyalurkan cadangan pangan berupa beras bila kondisi darurat , Pagu Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 161.999.828,- dengan Realisasi sebesar Rp. 121.609.505,- atau 75,07 %.
- Penyaluran Cadangan Pangan (CPP) pada tahun 2023 adalah sebesar 7.890 Kg dari CPP yang tersedia sebesar : 55.696,75 Kg.
- Penyaluran digunakan untuk bantuan banjir untuk keperluan dapur umum.

VI. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini bertujuan untuk peningkatan produk perikanan yang berdaya saing dengan cara meningkatkan nilai tambah produk perikanan dan meningkatnya nilai konsumsi ikan. Pagu anggaran program ini Rp. 2.164.893.823,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.925.820.040,-. Program ini didukung dengan 2 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

a. Pelaksanaan bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Sub kegiatan bertujuan untuk meningkatkan produksi dan variasi produk olahan ikan serta menjamin keamanan produk hasil perikanan, Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.024.893.898,- dengan Realisasi Rp. 1.788.408.879,- atau 88,32 %, dengan rincian kegiatan :

- Rehabilitasi Pasar Ikan sebanyak 3 Unit
- Bedah UPI Skala Kecil (Perbaikan Bangunan beserta Perlengkapan pendukung (dana DAK) sebanyak 3 Unit

2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

- a. Pemberian fasilitasi bagi pelaku usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk gemar makan ikan yang dimulai dari masa ibu hamil (Bayi dalam Kandungan). Mengingat ikan memiliki komposisi nutrisi yang sangat baik untuk kesehatan, kecerdasan dan pertumbuhan serta mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan, pembudidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui peningkatan rata-rata konsumsi ikan.

Pagu Anggaran setelah refocusing sebesar Rp. 139.999.925,- dan terealisasi sebesar Rp. 137.411.161 ,- atau 98,15 %, kegiatan pada Sub kegiatan ini berupa Lomba Masak Serba ikan Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Pusat dan Forikan.

C. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dikarenakan telah dilakukan penyesuaian target kinerja dan anggaran pada saat perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, sehingga capaian kinerja tidak ada yang melebihi target.

D. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program kegiatan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya capaian target kinerja, yaitu :

1. Masih belum adanya kesepahaman kebijakan antara Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan TAPD dalam menentukan program prioritas.
2. Masih kurangnya petugas penyuluh perikanan lapangan.
3. Pola Konsumsi Masyarakat masih belum beragam

4. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan arti gizi dan Kesehatan
5. Masih terbatasnya promosi dan penyebaran informasi
6. Masih kurangnya pengawasan keamanan pangan yang beredar di masyarakat
7. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha perikanan dalam teknologi pengolahan perikanan.
8. Belum optimalnya penggunaan Teknologi Pakan ikan

Faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi capaian kinerja program dan kegiatan yang realiasi kinerja mencapai target kinerja sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
 - a. Motivasi dan dorongan kelompok perikanan tangkap dan kelompok pembudidaya untuk terus belajar dalam usaha pengolahan dan budidaya minimal untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
 - b. Banyaknya bantuan yang diberikan oleh lembaga – lembaga pemerintah yaitu dari Kementerian (Pusat), Pemerintah Provinsi maupun dari Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk memberikan bantuan kepada kelompok – kelompok pembudidaya ikan yang masih eksis maupun bentukan – bentukan baru sebagai stimulant bantuan benih/bibit ikan, dan bantuan peralatan penangkapan bagi nelayan.
2. Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan
 - a. Seringnya sosialisasi pengolahan pangan lokal di Nagari dan sekolah-sekolah dalam pemanfaatan sumberdaya pangan lokal yang ada di pekarangan.
 - b. Semakin beragamnya konsumsi pangan masyarakat yang bergizi seimbang dan aman.

E. Implikasi yang timbul terhadap capaian target program

Peningkatan sarana dan prasarana perikanan membawa dampak terhadap peningkatan hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

F. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran terhadap faktor penyebab tersebut

Pada perencanaan dan penganggaran berikutnya diharapkan adanya beberapa kebijakan yang dapat dilaksanakan :

1. Dalam rangka peningkatan produksi Perikanan maka perlu dilakukan bimtek untuk budidaya perikanan dan pengolahan hasil perikanan,
2. Pembangunan perikanan diarahkan untuk peningkatan produksi dan peningkatan kualitas agar memiliki daya saing.
3. Pembangunan sektor pangan diarahkan pada peningkatan lumbung pangan, pengembangan tanaman pengganti beras atau umbi-umbian, dan sosialisasi Pangan Lokal, B2SA,
4. Penurunan tingkat kerawanan pangan masyarakat,
5. Ketersediaan cadangan pangan pemerintah dan
6. Keamanan Pangan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2023 Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 T-C. 29.

TABEL 2.1 T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2024
KABUPATEN PESIRIS SELATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Ranja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun berjalan	
			Vol	Satuan		Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	URUSAN PERIKANAN DAN PANGAN										
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
		Nilai Selip Dinas Pangan oleh Inspektoral	80								
		Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100								
2 09 01 201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100		100	100	100	1	100	100	25
2 09 01 201	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	8	4	4	1	4	15	4
2 09 01 201	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	2	1	1	1	1	4	4
2 09 01 201	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	2	1	1	1	1	4	4
2 09 01 201	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	1	Dokumen	2	1	1	1	1	4	4
2 09 01 201	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	2	1	1	1	1	4	4

2	09	01	201	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	2	1	1	1	1	4	4
2	09	01	201	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	24	12	12	1	12	48	4
2	09	01	202	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan									
2	09	01	202	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	Orang	74	40	36	0,9	40	150	3,75
2	09	01	202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	24	12	12	1	1	37	37
2	09	01	202	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	24	12	10	0,83	1	35	35
2	09	01	202	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	Laporan	12	6	6	1	1	19	19
2	09	01	203	Kegiatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
2	09	01	205	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
2	09	01	205	Kegiatan Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah										
2	09	01	205	Pengadaan Pakan Dinas beserta Akibat Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Akibat Kelengkapan	1	Paket	1	1	0	0	1	1	1
2	09	01	205	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	Pengawas	8	5	0	0	8	16	2
2	09	01	206	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah									
2	09	01	206	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	24	10	12	1,2	1	37	37
2	09	01	206	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	15	10	7	0,7	1	23	23
2	09	01	206	Penyediaan Perbaikan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	0	0	0	#DIV/0!	1	1	1

2	09	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	30	12	12	1	12	54	4,5
2	09	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2	1	1	1	1	4	4
2	09	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	Dokumen	24	24	24	1	12	60	5
2	09	01	206	06	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	Laporan	12	12	12	1	1	25	25
2	09	01	206	06	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	12	12	12	1	1	25	25
2	09	01	206	10	Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	0	0	0	#DIV/0!	1	1	1
2	09	01	207		Kegiatan/Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik									
2	09	01	207	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	Unit	0	0	0	#DIV/0!	2	2	1
2	09	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	Unit	0	0	0	#DIV/0!	2	2	1
2	09	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	41	Paket	0	0	0	#DIV/0!	41	41	1
2	09	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	Unit				#DIV/0!	15	15	1
2	09	01	208		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD Dinas Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Panjang									
2	09	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	24	12	12	1	1	37	37
2	09	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	12	6	6	1	1	19	19
2	09	01	209		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik									
2	09	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	1	1	1	1	1	3	3
2	09	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37	Unit	42	42	40	1	37	119	3
2	09	01	209	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	60	Paket	0	0	0	#DIV/0!	60	60	1

2	09	01	208	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	Unit	20	20	20	1	60	100	2
2	09	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	5	5	5	1	5	15	3
2	09	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Keadailatan dan Kemandirian Pangan	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan	100		100	100		1			
2	09	02	201		Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Masyarakat	20		12	20	20	1	20		
2	09	02	201	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	1	Unit	7	4	0	0	4	11	11
2	09	02	201	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	1	Unit	7	4	0	0	4	11	11
2	09	02	201	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1	Unit	7	4	0	0	4	11	11
2	09	02	201	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1	Laporan	12	12	0	0	12	24	24
2	09	02	201	05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	1	Dokumen	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
2	09	02	201	06	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	1	Unit	7	7	0	0	7	14	14
					Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Konsumsi energi	2450		2440	2440	2440	1	2450	7330	2.981836735
2	09	03	2.01		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	67		67	67	67	1,00	67	201	3
2	09	03	201	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1	Laporan	2	1	1	1	1	4	4
2	09	03	201	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1	Laporan	0	1	0	0	1	1	1

2	09	03	201	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tali Indonesia yang Dikembangkan	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tali Indonesia yang Dikembangkan		Unit	0	5	0	0	5	5	#DIV/0!
2	09	03	201	07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	150	Keluarga	0	30	0	0	150	150	1
2	09	03	201	08	Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produksi dan Konsumsi di Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tali Indonesia yang Dikembangkan	4	Laporan	24	12	12	1	4	40	10
2	09	03	201	09	Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1	Laporan	0	0	0	#DIV/0!	1	1	1
2	09	03	201	10	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	5	Unit	10	15	12	0,8	5	27	5,4
2	09	03	201	11	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	12	Dokumen	0	0	0	#DIV/0!	12	0	0
2	09	03	201	12	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produksi dan Konsumsi Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat produksi dan konsumen wilayah Kabupaten/Kota	12	Laporan	0	0	0	#DIV/0!	12	12	1
2	09	03	201	13	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	0	0	0	#DIV/0!	1	1	1
2	09	03	201	14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	12	Laporan	0	0	0	#DIV/0!	12	12	1
2	09	03	201	15	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	12	Dokumen	0	1	0	0	12	0	0
2	09	03	201	16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1	Dokumen	0	1	0	0	1	1	1
2	09	03	202		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota										
2	09	03	202	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1	Laporan	0	1		0	1	1	1
2	09	03	202	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1
2	09	03	202	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80	Ton	55,7	73,2	8	0,11	80	143,7	1,80
2	09	03	202	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpolihara	80	Ton	55,7	73,2	8	0,11	80	143,7	1,80
2	09	03	202	05	Penyusunan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah penyusunan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80	Ton	55,7	73,2	8	0,11	80	143,7	1,80
2	09	03	204		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita	skor pola pangan harapan	86,5		81,7	87	80,4				

					Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		2150	kcal/kapita/ hari	2150	2221	2071			
							57	gram/kapita/ hari	57	60,34	54,4			
2	09	03	204	01	Penyusunan dan Penetapan Tingkat Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Tingkat Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1	Dokumen	1	1	1	1	2	2
2	09	03	204	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Evaluasi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan dan Evaluasi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1	Laporan	2	1	1	1	4	4
2	09	03	204	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemerintahan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemerintahan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1	Laporan	1	1	1	1	3	3
2	09	04			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Berkurangnya angka rawan pangan	2		2	2	2	2		
2	09	04	201		Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya database ketahanan pangan dan peta ketahanan dan kerentanan pangan								
2	09	04	201	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1	Dokumen	2	1	1	1	4	4
2	09	04	202		Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah daerah rawan pangan yang diurangi	2		2	2	2	2		
2	09	04	202	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyediaan Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyediaan Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	1	1	1	3	3
2	09	04	202	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1	Laporan	1	1	1	1	3	3
2	09	04	202	04	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1	Dokumen	0	0	0	#DIV/0!	1	1
2	09	04	202	05	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1	Dokumen	0	0	0	#DIV/0!	1	1
2	09	05			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Registrasi PSAT (beras)	5		9	5	5	1	5	2
						Rekomendasi sertifikat prima	5		12	5	5	1	5	2

2	09	05	201	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah registrasi PSAT (Benar) dan rekomendasi sertifikat prima yang diterbitkan												
2	09	05	201	04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	5	Dokumen	2	5	0	0	5	7	1,4			
2	09	05	201	06 Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	5	Dokumen	0	0	0	#DIV/0!	5	5	1			
2	09	05	201	07 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1	Dokumen	0	0	0	#DIV/0!	1	1	1			
2	09	05	201	08 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1	Laporan	0	1	0	0	1	1	1			
2	06	05	201	09 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1	Dokumen	0	1	0	0	1	1	1			
				URUSAN PILIHAN													
				URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN													
3	25	03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	0		0	35.727	35.549	1,00	35.727	100%				
					Jumlah keluarga perikanan tangkap yang meningkat pendapatannya	0		0	14.110	14.072	1,00	.	100%				
3	25	03	201	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusutakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)												
3	25	03	201	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	12	Dokumen	12	12	12	1	12	24	2			
3	25	03	202	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten /Kota	Peningkatan Keles Klub dan Pembinaan	35.727		36.447	46.940	35.549	76%	35.727					
3	25	03	202	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	142	Orang	133	124	124	1	130	387	2,73			
3	25	03	202	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	40	kelompok	40	800	15	0,02	40	95	2,38			

3	25	03	202	03	03	Peaksanaan Fasilitas Bantuan Pendidikan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Pembinaan, Bantuan Pendidikan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	28	unit Usaha	50	120	3	0,03	28	53	1,9
3	25	03	203	03	03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)										
3	25	03	203	03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	Layanan	0	1	0	0	1	1	1
3	25	04				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	13250	ton	16.106	12.518	14.092	1,12	13.250	112%	112%
3	25	04	202	04		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah keluarga pelaku perikanan yang meningkat pendapatannya	0	ton	0	3.357	2	0,50	-	70%	70%
							Jumlah Produksi Budidaya Perikanan (Ton)	13250	ton	16.106	17.936	14.092	0,79	13.250	79%	79%
3	25	04	202	04	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	30	kelompok		4		0	30	30	1
3	25	04	202	04	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kembangkan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kembangkan	3	kelompok		4		0	3	3	1
3	25	04	202	04	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	8	kelompok		4		0	8	8	1
3	25	04	204	04		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan		produksi							
3	25	04	204	04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12	data	24	12	12	1	12	48	4
3	25	04	204	04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12	prasarana	24	12	12	1	12	48	4
3	25	04	204	04	05	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6	sarana	14	7	7	1	6	27	4,5
3	25	04	204	04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengkajian Kesehatan Ikan	1	hasil	2	1	1	1	1	4	4

3	25	04	204	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Menerima Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	30	petudidaya		70		0	30	0	0
3	25	04	204	12	Perencanaan, Pengembangan, Pemantauan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	1	lahan	0	1772		0	1	1	1
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan			22	17	16	0,94	7		
3	25	06	201		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Data usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan		usaha							
3	25	06	201	05	Penyebaran Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	12	Dokumen	5	6	1	0,17	12	18	1,5
3	25	06	202		Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			sertifikat							
3	25	06	202	02	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang menyediakan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	8	unit Usaha	15	3		0	8	23	2.875
3	25	06	203		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya angka konsumsi ikan		angka							
3	25	06	203	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	10	Pelaku Usaha	6	8	8	1	8	14	1,4

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan, dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 dan rasionalisasi Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026.

Penetapan indikator kinerja pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah serta tujuan dan sasaran Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dapat diukur melalui 4 (empat) indikator, yaitu:

a) Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perikanan dan Pangan

Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perikanan dan Pangan merupakan nilai yang dikeluarkan oleh Tim Asesor Internal Pemerintah Daerah dengan melakukan penilaian secara mandiri berdasarkan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada pemenuhan nilai pengungkit 60% dan hasil 40%. Nilai ini setiap tahunnya diberikan oleh Inspektorat Daerah sebagai Asesor sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB no 26 tahun 2020. Untuk menentukan Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perikanan dan Pangan adalah Hasil penilaian Reformasi Birokrasi Dinas Perikanan dan Pangan oleh Tim Penilai Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada tahun 2024 Evaluasi Reformasi Birokrasi tidak dilakukan lagi pada OPD sesuai Permen PAN RB RI no. 9 tahun 2023 tentang Reformasi Birokrasi dan Kepmen PAN RB RI No 739 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Target Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perikanan dan Pangan 2021-2026 dapat dilihat seperti dibawah ini:

Tabel 2.2 Target Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perikanan dan Pangan

No	Indikator	Target Perangkat Daerah				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Nilai RB Perangkat Daerah	65 (B)	65 (B)	66 (B)	-	-

b) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Pangan

Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian terhadap rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk menentukan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Pangan adalah Laporan Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat seperti dibawah ini:

Tabel 2.3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2021 – 2026

No	Indikator	Target Perangkat Daerah				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	A (81,00)	A(81,50)	A (82,00)	A (82,50)

c) Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah. Untuk menentukan Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perikanan dan Pangan adalah hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA. Tahun 2023 dan dilanjutkan tahun

2024 inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Pangan adalah GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan).

**Tabel 2.4 Target Nilai Kematangan Inovasi
Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2021-2026**

No	Indikator	Target Perangkat Daerah			
		2022	2023	2024	2025
1	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perikanan dan Pangan	80	100	100	100

d) Jumlah Produksi Perikanan

Produksi perikanan merupakan salah satu sub sektor pendukung pencapaian PDRB sektor pertanian. Target Jumlah Produksi Perikanan tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5 Target Jumlah Produksi Perikanan

No	Indikator	Target Perangkat Daerah			
		2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Produk Perikanan	48.977	53.945	50.694	51.604

e) Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan

Tabel 2.6 Target Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan

No	Indikator	Target Perangkat Daerah			
		2022	2023	2024	2025
1	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	87	82	84	85

PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.

Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keberagaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi padangan pada tahun-tahun mendatang.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah nilai yang didapat dari perhitungan data jumlah konsumsi energi per kelompok pangan.

Kelompok pangan tersebut adalah : 1. padi-padian 2. umbi-umbian 3. Pangan hewani 4. Minyak dan lemak 5. buah/biji berminyak 6. Kacang-kacangan 7. Gula 8. sayur dan buah 9. lain-lain.

Target capaian kualitas konsumsi pangan (Skor PPH) dapat terwujud apabila setiap wilayah baik kabupaten/kota maupun provinsi di Indonesia memiliki capaian konsumsi pangan yang berkualitas mengarah pada pola komposisi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA).

Untuk lebih lengkap pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.7 T-C. 30

TABEL 2.7 T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	5	6	7	8	11	12	13	14	16
1			65 (B)	65 (B)	66 (B)	67 (B)	65 (B)	0	66 (B)	67 (B)	Pada tahun 2024 Evaluasi Reformasi Birokrasi tidak dilakukan lagi pada OPD sesuai Permen PAN RB RI no. 9 tahun 2023 tentang Reformasi Birokrasi dan Kepmen PAN RB RI No 739 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi
			A	A (81,00)	A (81,50)	A (82,00)	A (80,97)	A (81,46)	A (81,50)	A (82,00)	
2			87	82	84	85	80,4	88,9	84	85	
3			149.579.005.538	85.885.000.000	85.035.000.000	86.235.000.000	85.126.892.500	86.735.261.500	86.035.000.000	86.235.000.000	
4					100	100		0	100	100	
								63			

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Pangan

Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:

1. Dinas Perikanan dan Pangan perlu melakukan beberapa peningkatan dan pembenahan dalam penyelenggaraan pemerintahan diantaranya pengembangan kinerja menggunakan teknologi informasi, capaian kinerja mulai dari Eselon IV keatas dikaitkan atau dimanfaatkan sebagai reward dan punishment dan adanya revisi IKU berkala untuk menunjukkan kondisi yang lebih baik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Perikanan dan Pangan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah diantaranya :
 - a. Produksi benih ikan oleh Dinas Perikanan dan Pangan masih terbatas, hal ini disebabkan oleh induk yang kurang memadai dan sarana prasarana Balai Benih Ikan yang belum mencukupi kebutuhan produksi benih.
 - b. Pembinaan dalam penerapan teknologi di bidang budidaya belum menyeluruh.
 - c. Pelaku usaha di bidang budidaya perikanan memiliki keterbatasan pengetahuan sehingga menimbulkan hambatan dalam investasi budidaya perikanan.
 - d. Sarana dan prasarana kesehatan ikan kurang memadai. Sarana dan prasarana tersebut mencakup instrumen pengukuran kualitas air dan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.
 - e. Pengembangan kapasitas dan kelembagaan nelayan masih belum merata dan menyeluruh
 - f. Penumbuhan kelompok pengawas masyarakat belum optimal dan diperlukan pembinaan kepada masyarakat
 - g. Peningkatan cadangan pangan belum optimal, hal ini berdampak pada tingkat ketersediaan pangan
 - h. Infrastruktur ketahanan pangan belum menyeluruh di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
 - i. Masih adanya wilayah rawan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan.
 - j. Konsumsi Pangan belum berkontribusi secara optimal pada skor pph.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Dinas Perikanan dan Pangan merupakan penjabaran visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang lebih spesifik dan terukur yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, yang memuat program dan kegiatan dalam pembangunan sektor perikanan dan pangan. Review terhadap rancangan awal berpedoman pada kebutuhan rancangan awal RKPD yang disusun mulai dari musrenbang nagari, musrenbang kecamatan, Forum Organisasi Perangkat Daerah. Hasil review menunjukkan rancangan awal RKPD sejalan dengan kebutuhan dari Dinas Perikanan dan Pangan tabel 2.8 T-C 31.

TABEL 2.B.T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESIPIR SELATAN

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	TARGET Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1	URUSAN PERKAWAN DAN PANGAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB				11.934.227.390	URUSAN PERKAWAN DAN PANGAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB				21.525.296.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				9.398.227.380	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				11.600.290.000
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Misi Sektir Dinas Pangan oleh Inspektur			8.744.227.380	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sektir Dinas Pangan oleh Inspektur			7.905.290.000
		Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah			100.000.000	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah			330.000.000
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan dan Pangan	4 Dokumen	60.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan dan Pangan	4 Dokumen	80.000.000
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Dokumen	35.000.000
c.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Dokumen	35.000.000
d.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Dokumen	35.000.000
e.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Dokumen	35.000.000
f.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Laporan	50.000.000
g.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perikanan dan Pangan	12 Laporan	40.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perikanan dan Pangan	12 Laporan	60.000.000
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terfpo administrasi keuangan			4.800.000.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terfpo administrasi keuangan			4.531.290.000

RENCANA KERJA TAHUN 2025

a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.650.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perikanan dan Pangan	40 Orang	4.650.000.000
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	238.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Dokumen	242.250.000
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Laporan	30.000.000
d.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Laporan	33.000.000
3.	Kegiatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kegiatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.000.000	Kegiatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kegiatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			25.000.000
a.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	25.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Dokumen	25.000.000
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			90.000.000
a.	Pengadaan Pasokan Dinas beserta Akibat Kelengkapannya	Jumlah Paket Pasokan Dinas beserta Akibat Kelengkapannya	40.000.000	Pengadaan Pasokan Dinas beserta Akibat Kelengkapannya	Jumlah Paket Pasokan Dinas beserta Akibat Kelengkapannya	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Paket	40.000.000
b.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Perikanan dan Pangan	8 Orang	50.000.000
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	874.027.390	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			762.900.600
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Paket	40.000.000
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Paket	200.000.000
c.	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perawatan dan Perlengkapan Rumah Tangga yang Disediakan	10.000.000	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perawatan dan Perlengkapan Rumah Tangga yang Disediakan	Dinas Perikanan dan Pangan	12 Paket	60.000.000
d.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Perikanan dan Pangan	12 Paket	51.600.000
e.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28.427.390	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Paket	30.000.000
f.	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5.400.000	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dinas Perikanan dan Pangan	12 Dokumen	5.400.000
g.	Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10.000.000	Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Laporan	10.000.000
h.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Laporan	300.000.000
i.	Penatausahaan Arip Dinas pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arip Dinas pada SKPD	35.000.000	Penatausahaan Arip Dinas pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arip Dinas pada SKPD	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Dokumen	35.000.000

RENCANA KERJA TAHUN 2025

6.	Kegiatan/Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.000.000			Perentase barang milik daerah yang berkategori baik	Persentase barang milik daerah yang berkategori baik	950.000.000
a.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	2 Unit	Dinas Perikanan dan Pangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Dinas Perikanan dan Pangan	450.000.000
b.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	300.000	2 Unit	Dinas Perikanan dan Pangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Dinas Perikanan dan Pangan	150.000.000
c.	Pengadaan Mebel	250.000.000	41 Unit	Dinas Perikanan dan Pangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas Perikanan dan Pangan	250.000.000
d.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	15 Unit	Dinas Perikanan dan Pangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dinas Perikanan dan Pangan	100.000.000
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.000.000			Terpilihnya BMD Dinas Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pangan		280.000.000
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000	1 Laporan	Dinas Perikanan dan Pangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Perikanan dan Pangan	120.000.000
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.000.000	1 Laporan	Dinas Perikanan dan Pangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Perikanan dan Pangan	160.000.000
II.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	405.000.000			Persentase barang milik daerah yang berkategori baik		500.000.000
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	1 Unit	Dinas Perikanan dan Pangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas Perikanan dan Pangan	60.000.000
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000	37 unit	Dinas Perikanan dan Pangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	Dinas Perikanan dan Pangan	275.000.000
c.	Pemeliharaan Mebel	0	60 unit	Dinas Perikanan dan Pangan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Dinas Perikanan dan Pangan	30.000.000
d.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	60 unit	Dinas Perikanan dan Pangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Perikanan dan Pangan	25.000.000
e.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	5 unit	Dinas Perikanan dan Pangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Perikanan dan Pangan	200.000.000
II.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kemandirian dan Kemandirian Pangan	40.000.000			Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras jagung sesuai kebutuhan)		640.000.000
1	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000			Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Masyarakat		640.000.000

a.	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Kab. Pesir Selatan, Semua Kecamatan	1 Unit	0	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Kab. Pesir Selatan, Semua Kecamatan	2 Unit	0
b.	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	Kab. Pesir Selatan, Semua Kecamatan	1 Unit	0	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	Kab. Pesir Selatan, Semua Kecamatan	1 Unit	0
c.	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Kab. Pesir Selatan, Semua Kecamatan	1 Unit	0	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Kab. Pesir Selatan, Semua Kecamatan	1 Unit	600.000.000
d.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Kab. Pesir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	40.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Kab. Pesir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	40.000.000
e.	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Kab. Pesir Selatan, Semua Kecamatan	1 Paket 0 Dokumen	0	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Kab. Pesir Selatan, Semua Kecamatan	1 Paket 0 Dokumen	0
f.	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Pesir Selatan, Semua Kecamatan	1 Unit	0	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Pesir Selatan, Semua Kecamatan	1 Unit	0
III	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Konsumsi energi			2.235.000.000	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Konsumsi energi			2.600.000.000
1.	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Dasar Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Pangan Utama			830.000.000	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Dasar Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Pangan Utama			1.110.000.000
a.	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kab. Pesir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	0	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kab. Pesir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	20.000.000
b.	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Kab. Pesir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	45.000.000	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Kab. Pesir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	45.000.000
c.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kab. Pesir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	25.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kab. Pesir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	80.000.000
d.	Pemerataan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemerataan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Pesir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	0	Pemerataan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemerataan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Pesir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	20.000.000
e.	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kab. Pesir Selatan, Semua Kecamatan	150 Keluarga	200.000.000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kab. Pesir Selatan, Semua Kecamatan	150 Keluarga	200.000.000
f.	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Kab. Pesir Selatan, Semua Kecamatan	4 Laporan	0	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Kab. Pesir Selatan, Semua Kecamatan	4 Laporan	100.000.000
g.	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Kab. Pesir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	100.000.000	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Kab. Pesir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	100.000.000

No.	Pengembangan Kemitraan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kemitraan Distribusi Pangan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	5 Unit	400.000.000	Pengembangan Kemitraan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kemitraan Distribusi Pangan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	5 Unit	400.000.000
1.	Pemerataan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	12 Dokumen	0	Pemerataan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	12 Dokumen	20.000.000
2.	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produksi dan Konsumsi Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produksi dan Konsumsi wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	12 Laporan	40.000.000	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produksi dan Konsumsi Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produksi dan Konsumsi wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	12 Laporan	40.000.000
3.	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen	0	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen	20.000.000
4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemerintah Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemerintah stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemerintah Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemerintah stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	25.000.000
5.	Pemerataan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	12 Dokumen	0	Pemerataan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	12 Dokumen	20.000.000
6.	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen	20.000.000
2.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota				1.230.000.000	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota				1.235.000.000
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	25.000.000
b.	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen	0	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen	20.000.000
c.	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	80 ton	1.130.000.000	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	80 ton	1.130.000.000
d.	Peneliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	80 ton	0	Peneliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	80 ton	20.000.000
e.	Penyusunan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah penyusunan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	80 ton	100.000.000	Penyusunan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah penyusunan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	80 ton	100.000.000
3.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	skor pola pangan harapan			175.800.000	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	skor pola pangan harapan			195.800.000
a.	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen	0	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen	20.000.000
b.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakannya Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakannya Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	150.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakannya Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakannya Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	150.000.000

c.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	25.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	25.000.000
IV.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Belum adanya laporan rawan pangan			300.000.000		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Belum adanya laporan rawan pangan			375.000.000
1.	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya database ketahanan pangan dan peta ketahanan dan kerentanan pangan			50.000.000		Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya database ketahanan pangan dan peta ketahanan dan kerentanan pangan			50.000.000
a.	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen	50.000.000		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen	50.000.000
2.	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kawasan Kecamatan Kota	Jumlah daerah rawan pangan yang ditangani			250.000.000		Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kawasan Kecamatan Kota	Jumlah daerah rawan pangan yang ditangani			325.000.000
a.	Pelaksanaan Pengabdian, Pengabdian, dan Penyuluhan Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengabdian, Pengabdian, dan Penyuluhan Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen	0		Pelaksanaan Pengabdian, Pengabdian, dan Penyuluhan Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengabdian, Pengabdian, dan Penyuluhan Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen	70.000.000
b.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kecamatan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kecamatan Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	0		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kecamatan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kecamatan Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	30.000.000
c.	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen	250.000.000		Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen	200.000.000
d.	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen	0		Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen	25.000.000
V.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Registasi PSAT (bersat)			80.000.000		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Registasi PSAT (bersat)			80.000.000
		Tersedianya sertifikat prima						Tersedianya sertifikat prima			
1.	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah registrasi PSAT (bersat) dan rekomendasi sertifikat prima yang diterbitkan			80.000.000		Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah registrasi PSAT (bersat) dan rekomendasi sertifikat prima yang diterbitkan			90.000.000
a.	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	5 Dokumen	60.000.000		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	5 Dokumen	60.000.000
b.	Rekomendasi Peredaran Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	5 Dokumen	0		Rekomendasi Peredaran Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	5 Dokumen	0
c.	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	20.000.000		Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	20.000.000
	URUSAN PILIHAN	2.535.000.000			2.535.000.000		URUSAN PILIHAN	2.535.000.000			10.325.000.000
	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN						URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				10.325.000.000
VI.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap			880.000.000		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap			3.860.000.000

1.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Disusutkan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000				Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	12 Dokumen	20.000.000
a.	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	20.000.000	12 Dokumen	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Peningkatan Kelas KUB dan Pembinaan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	12 Dokumen	20.000.000
2.	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	800.000.000				Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kelas KUB dan Pembinaan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	130 orang	3.800.000.000
a.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	800.000.000	130 orang	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kelas KUB dan Pembinaan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	130 orang	3.800.000.000
b.	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kemitraan Nelayan Kecil	30.000.000	40 Kelompok	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kemitraannya	Peningkatan Kelas KUB dan Pembinaan	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kemitraannya	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	40 Kelompok	30.000.000
c.	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendidikan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	30.000.000	28 Unit Usaha	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Bantuan Pendidikan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Peningkatan Kelas KUB dan Pembinaan	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Bantuan Pendidikan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	28 Unit Usaha	30.000.000
3.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0				Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Peningkatan Kelas KUB dan Pembinaan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	0	0
a.	Playatan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0	0 Layanan 1 Paket	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Peningkatan Kelas KUB dan Pembinaan	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	0 Layanan 1 Paket	0
VII	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.390.000.000				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Kelas KUB dan Pembinaan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan		4.670.000.000
1.	Pembudayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	510.000.000				Pembudayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Peningkatan Kelas KUB dan Pembinaan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan		730.000.000
a.	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	300.000.000	30 Kelompok	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Peningkatan Kelas KUB dan Pembinaan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	30 Kelompok	500.000.000
b.	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kemitraan Pembudi Daya Ikan Kecil	30.000.000	3 Kelompok	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kemitraannya	Peningkatan Kelas KUB dan Pembinaan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kemitraannya	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	3 Kelompok	30.000.000
c.	Penyediaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kemitraan Pembudi Daya Ikan Kecil	180.000.000	8 Kelompok	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Kelompok Usaha yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kemitraannya	Peningkatan Kelas KUB dan Pembinaan	Jumlah Kelompok Usaha yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kemitraannya	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	8 Kelompok	200.000.000
2.	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	800.000.000				Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan Kelas KUB dan Pembinaan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan		3.940.000.000
a.	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	12 Dokumen	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kelas KUB dan Pembinaan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	12 Dokumen	20.000.000
b.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	320.000.000	5 Paket	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kelas KUB dan Pembinaan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	5 Paket	2.360.000.000

c.	Penyediaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terjual Melalui Pengalangan Kesehatan Ikan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen	250.000.000	Pengalangan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terjual Melalui Pengalangan Kesehatan Ikan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen	250.000.000
d.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	6 unit	1.000.000.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	6 unit	1.000.000.000
e.	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidayaan yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	30 Orang	20.000.000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidayaan yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	30 Orang	20.000.000
f.	Perencanaan, Pengembangan, Pemantauan dan Pendukung Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dileveling	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen	270.000.000	Perencanaan, Pengembangan, Pemantauan dan Pendukung Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dileveling	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen	270.000.000
VIII.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan			345.000.000	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan			1.775.000.000
1.	Kegiatan Penertiban Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Data usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan			25.000.000	Kegiatan Penertiban Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Data usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan			35.000.000
a.	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	12 Dokumen	25.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	12 Dokumen	35.000.000
2.	Kegiatan Pembinaan Mitra dan Kooperator Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terbtiya sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)			40.000.000	Kegiatan Pembinaan Mitra dan Kooperator Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terbtiya sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)			1.540.000.000
a.	Pembinaan terhadap Penerapan Penyertan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Penyertan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	8 Unit Usaha	40.000.000	Pembinaan terhadap Penerapan Penyertan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Penyertan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	8 Unit Usaha	1.540.000.000
3.	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya angka konsumsi ikan			200.000.000	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya angka konsumsi ikan			200.000.000
a.	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	60 Pelaku Usaha	200.000.000	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	60 Pelaku Usaha	200.000.000
					11.934.227.350					21.925.200.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Usulan program dan kegiatan Dinas Perikanan dan Pangan melalui proses penyampaian aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat tersebut diajukan melalui musrenbang yang melibatkan stakeholder terkait. Usulan program dan kegiatan diidentifikasi Dinas Perikanan dan Pangan dengan bantuan Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil identifikasi usulan selanjutnya diterima dan dimasukkan ke dalam rencana kerja.

Usulan yang diterima terdiri dari 8 program yang mencakup aspek penunjang urusan pemerintah, kedaulatan pangan, diversifikasi pangan, kerawanan pangan, keamanan pangan, perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan. Program dan kegiatan yang diusulkan dapat dilihat pada tabel 2.9 T-C. 32.

TABEL 2.9 T-C.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESIR SELATAN

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
1						
	URUSAN PERIKANAN DAN PANGAN				11.934.227.390	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB				9.399.227.390	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				9.399.227.390	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Cinas Pangan oleh Inspektorat			6.744.227.390	
		Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan dan Pangan	4 Dokumen	60.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Laporan	0	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perikanan dan Pangan	12 Laporan	40.000.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan			4.800.000.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perikanan dan Pangan	40 Orang	4.550.000.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Dokumen	230.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Laporan	20.000.000	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Laporan	0	
Kegiatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				25.000.000	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Dokumen	25.000.000	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				90.000.000	
Pengadaan Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Paket	40.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Perikanan dan Pangan	8 Orang	50.000.000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah			674.027.390	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Paket	40.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Paket	200.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Perikanan dan Pangan	12 Paket	10.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Perikanan dan Pangan	12 Paket	45.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Paket	28.627.390	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dinas Perikanan dan Pangan	12 Dokumen	5.400.000	
Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Laporan	10.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Laporan	300.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Dokumen	35.000.000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkategori baik			300.200.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Dinas Perikanan dan Pangan	2 Unit	-	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Dinas Perikanan dan Pangan	2 Unit	200.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas Perikanan dan Pangan	41 Unit	250.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dinas Perikanan dan Pangan	15 Unit	50.000.000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD Dinas Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Pangan			270.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Laporan	120.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Laporan	150.000.000	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkategori baik			485.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Unit	60.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Perikanan dan Pangan	37 unit	250.000.000	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Dinas Perikanan dan Pangan	60 unit	0	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Perikanan dan Pangan	60 unit	25.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Perikanan dan Pangan	5 unit	150.000.000	
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan			40.000.000	
Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Masyarakat			40.000.000	
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Unit	0	

Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Unit	0	
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Unit	0	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	40.000.000	
Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Paket	0	
Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Unit	0	
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Konsumsi energi			2.235.000.000	
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Pangan Utama			830.000.000	
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	0	
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	45.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	25.000.000	
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	0	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	150 Keluarga	200.000.000	
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	4 Laporan	0	
Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	100.000.000	
Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	5 Unit	400.000.000	
Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	12 Dokumen	0	
Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	12 Laporan	40.000.000	
Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen	0	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	0	
Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	12 Dokumen	0	
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen	20.000.000	
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				1.230.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	0	
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen	0	
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	80 ton	1.130.000.000	
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	80 ton	0	
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	80 ton	100.000.000	

Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	skor pola pangan harapan				175.000.000	
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen		0	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penguatan Keamanan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penguatan Keamanan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan		150.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan		25.000.000	
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Berkurangnya ragan rawan pangan				300.000.000	
Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya database ketahanan pangan dan peta ketahanan dan kerentanan pangan				50.000.000	
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen		50.000.000	
Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kawasan Kabupaten/Kota	Jumlah daerah rawan pangan yang ditangani				250.000.000	
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen		0	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan		0	
Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen		250.000.000	
Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen		0	
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Registrasi PSAT (beras)				30.000.000	
	Rekomendasi sertifikat prima					
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah registrasi PSAT (Beras) dan rekomendasi sertifikat prima yang diterbitkan				30.000.000	
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	5 Dokumen		60.000.000	
Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	5 Dokumen		0	
Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan		20.000.000	
URUSAN PILIHAN					2.535.000.000	
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					2.535.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap				880.000.000	
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Ruwa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					20.000.000	
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	12 Dokumen		20.000.000	
Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kelac KUB dan Pembinaan				860.000.000	
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	130 orang		800.000.000	
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	40 Kelompok		30.000.000	
Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	28 Unit Usaha		30.000.000	
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					0	
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	0 Layanan 1 Paket		0	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan				1.390.000.000	

Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil					510.000.000	
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	30 Kelompok		300.000.000	
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	3 Kelompok		30.000.000	
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	8 Kelompok		180.000.000	
Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan				880.000.000	
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	12 Dokumen		20.000.000	
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	5 Paket		320.000.000	
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen		250.000.000	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	5 unit		0	
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	30 Orang		20.000.000	
Pertencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luse Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Diencanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen		270.000.000	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan				265.000.000	
Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Data usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan				25.000.000	
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	12 Dokumen		25.000.000	
Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terbitnya sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)				40.000.000	
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	8 Unit Usaha		40.000.000	
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya angka konsumsi ikan				200.000.000	
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terasilitasi	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	60 Pelaku Usaha		200.000.000	
	JUMLAH				11.934.227.390	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan dasar dari arah kebijakan nasional. Penyusunan RPJMN dilakukan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJPN 2005-2025, Visi Misi Presiden menjadi landasan RPJMN yang di terjemahkan dalam 7 agenda pembangunan, diantaranya :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Berdasarkan agenda Presiden Republik Indonesia, Arah kebijakan yang sesuai sektor perikanan dan sektor pangan dalam agenda ini adalah Pengelolaan

sumberdaya ekonomi. Arah kebijakan pengelolaan sumberdaya ekonomi didukung oleh Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan.

RPJMN merupakan dasar dari penyusunan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI selaku pemegang kebijakan kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Arah dan Agenda Pembangunan Nasional, Presiden Republik Indonesia memberikan arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil kelautan dan perikanan, dan petambak garam, serta para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan; dan memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku pemangku kebijakan nasional tertuang dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP-RI). Penyusunan arah kebijakan dalam renstra KKP-RI mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan Presiden yang terkait dengan sektor kelautan dan dan perikanan yang terdiri dari :

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengemangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEE dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan.
2. Mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat .
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu prosuk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan.

4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
5. Penguatan SDM inovasi riset kelautan dan Perikanan.

Kesesuaian arah kebijakan nasional ditelaah dengan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan Pemerintah Kabupaten pada UU no 23 Tahun 2014 di bidang perikanan tangkap adalah pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota. Amanat undang-undang tersebut sesuai dengan arah kebijakan KKP-RI untuk memperbaiki komunikasi dengan nelayan evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengemangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEE dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan.

Pemerintah kabupaten/kota pada perikanan budidaya memiliki kewenangan dalam penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan. Kewenangan tersebut terdapat pada arah kebijakan KKP RI dalam mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat .

Ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas dari agenda pembangunan nasional yang didukung oleh kebijakan pemerintah. Dengan Visi "Terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional Berbasis Kedaulatan dan Kemandirian Pangan yang Tangguh dan berkelanjutan untuk Indonesia Maju dan Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong".

Penyelenggaraan pangan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia secara merata dan berkesinambungan sampai tingkat perseorangan dengan memperhatikan potensi sumberdaya dan kearifan lokal yang berwawasan

lingkungan. Keberhasilan penyelenggaraan pangan diindikasikan dengan situasi dan kondisi ketahanan pangan Nasional yang berdasarkan kedaulatan dan kemandirian pangan.

Arah kebijakan di bidang pangan dituangkan dalam rencana strategis Badan Pangan Nasional tahun 2022-2024, meliputi 3 (tiga) aspek: ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.

Sasaran Strategis dan Indikator Utama yang ingin dicapai dalam periode tahun 2022-2024 adalah :

1. Terpenuhinya Kebutuhan Pangan secara Optimal
2. Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
3. Terentaskannya Kerawanan Pangan dan Gizi
4. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar
5. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat
6. Pengembangan Data dan Informasi Pangan
7. Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan tersebut adalah dengan melaksanakan program dan kegiatan sesuai kewenangan yang tertuang pada UU No. 23 Tahun 2014, diantaranya:

1. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota.
2. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
3. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota.
4. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.
5. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

6. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan.
7. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota.
8. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/ kota.
9. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan diselaraskan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat sehingga adanya keselarasan dalam arah kebijakan. Penyandingan hasil penyelarasan visi dan misi RPJMD Sumatera Barat dengan RPJMD Pesisir Selatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan adalah :

1. Misi 1 Provinsi Sumatera Barat : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
Misi 2 Kabupaten Pesisir Selatan : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
2. Misi 1 Provinsi Sumatera Barat Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
Misi 3 Kabupaten Pesisir Selatan : Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.

Keselarasan ini diharapkan menjadi katalis dalam upaya pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan dalam jangka menengah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan dan Pangan

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

TABEL 3.1
Tujuan, Sasaran Renja Dinas Perikanan dan Pangan

Visi : Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang akuntabel dan Profesional			
Misi : 2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat			
3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi Dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah			
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
1. Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin Dan Rentan Miskin	Skor Pola Pangan Harapan	85
2. Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan	Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan	Jumlah Produk Perikanan	52.533

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan dan Pangan merupakan implementasi tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan pangan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan. Visi dan misi diwujudkan dalam pencapaian indikator sasaran tahun 2025 RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Program dan Kegiatan yang disusun disesuaikan dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD, aspirasi masyarakat dan dinamika pembangunan daerah. Jika program dan kegiatan yang dirumuskan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD maka akan dilakukan perbaikan terhadap program dan kegiatan yang tersaji dalam RKPD Tahun 2025.

Program Dinas Perikanan dan Pangan terbagi atas dua urusan yaitu urusan pangan dan perikanan, yang terdiri dari :

1. Urusan Pangan memiliki 5 Program, 15 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan. Urusan Pangan berisikan tentang kegiatan yang berkaitan dengan penunjang urusan

pemerintahan, kedaulatan pangan, diversifikasi pangan, kerawanan pangan dan keamanan pangan.

2. Urusan Perikanan terdiri atas 3 Program, 7 kegiatan dan 15 Sub Kegiatan. Substansi dari urusan perikanan adalah pengelolaan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Total seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan adalah 8 program, 22 kegiatan dan 57 sub kegiatan. Penyusunan program dan kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan arah kebijakan nasional, kewenangan kabupaten/kota, visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan dan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Rincian Program, Kegiatan dan Subkegiatan dijelaskan pada tabel 3.2 T-C. 33 berikut :

TABEL 3.2 T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PERIKANAN DAN PANGAN				11.934.227.390				11.934.227.390
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB				9.399.227.390				9.399.227.390
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				9.399.227.390				9.399.227.390
	PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Siskip Dinas Pangan oleh Inspektoriat			6.744.227.390				6.744.227.390
2 09 01 201	Penencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan petunjuk yang urusan perangkat daerah							
2 09 01 201 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan dan Pangan	4 Dokumen	100.000.000	APBD			310.000.000
2 09 01 201 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Dokumen	0	APBD		4 Dokumen	50.000.000
2 09 01 201 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Dokumen	0	APBD		1 Dokumen	35.000.000
2 09 01 201 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Dokumen	0	APBD		1 Dokumen	35.000.000
2 09 01 201 05	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan DPA-SKPD	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Dokumen	0	APBD		1 Dokumen	35.000.000
2 09 01 201 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Laporan	0	APBD		1 Laporan	50.000.000

2	09	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perikanan dan Pangan	12 Laporan	40.000.000	APBD		0 Laporan 12 Bulan	60.000.000
2	09	01	202		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penelitian lebih administrasi keuangan			4.900.000.000	APBD			5.098.790.000
2	09	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perikanan dan Pangan	40 Orang	4.500.000.000	APBD		0 Orang/bulan 14 Bulan	4.500.500.000
2	09	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelidikan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Dokumen	230.000.000	APBD		0 Dokumen 12 Bulan	242.280.000
2	09	01	202	06	Koordinasi dan Penyelenggaraan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Laporan	20.000.000	APBD		0 Laporan 12 Bulan	33.000.000
2	09	01	202	07	Koordinasi dan Penyelenggaraan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Laporan	0	APBD		0 Laporan 12 Bulan	33.000.000
2	09	01	203		Kegiatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			25.000.000				110.000.000
2	09	01	205	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Dokumen	25.000.000	APBD		0 Paket 12 Bulan	40.000.000
2	09	01	205		Kegiatan Administrasi Kapogawalan Perangkat Daerah				90.000.000				70.000.000
2	09	01	205	02	Pengadaan Peralatan Dinas beserta Akibat Kelengkapannya	Jumlah Paket Peralatan Dinas beserta Akibat Kelengkapannya	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Paket	40.000.000	APBD		1 Paket	40.000.000
2	09	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Perikanan dan Pangan	8 Orang	50.000.000	APBD		5 Orang	30.000.000
2	09	01	206		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penelitian lebih administrasi umum perangkat daerah			674.027.390				521.337.390
2	09	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Paket	40.000.000	APBD		1 Paket	40.000.000
2	09	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Paket	200.000.000	APBD		1 Paket	92.310.000
2	09	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Perikanan dan Pangan	12 Paket	10.000.000	APBD		12 Paket	10.000.000
2	09	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Perikanan dan Pangan	12 Paket	45.000.000	APBD		12 Paket	45.000.000
2	09	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Paket	28.627.390	APBD		1 Paket	28.627.390
2	09	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dinas Perikanan dan Pangan	12 Dokumen	5.400.000	APBD		12 Dokumen	5.400.000
2	09	01	206	08	Facilities Keuangan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Keuangan Tamu	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Laporan	10.000.000	APBD		1 Laporan	10.000.000
2	09	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Laporan	300.000.000	APBD		1 Laporan	300.000.000
2	09	01	206	10	Penatausahaan Arup Derasis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arup Derasis pada SKPD	Dinas Perikanan dan Pangan	1 Dokumen	35.000.000	APBD		1 Laporan	300.000.000

2	08	02	201	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	40.000.000	APBD	0 Laporan 1 Paket	150.000.000
2	08	02	201	05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Keluaran Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Keluaran Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Paket 0 Dokumen	0	APBD	1 Paket 0 Dokumen	110.000.000
2	08	02	201	06	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Unit	0	APBD	1 Paket 0 Dokumen	110.000.000
					Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Konsumsi energi			2.235.000.000 830.000.000			1.352.000.000 292.000.000
2	08	03	201		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Pangan Utama						
2	08	03	201	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	0	APBD	1 Laporan	132.000.000
2	08	03	201	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	45.000.000	APBD	1 Laporan	50.000.000
2	08	03	201	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	25.000.000	APBD	1 Laporan	35.000.000
2	08	03	201	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	0	APBD	1 Laporan	25.000.000
2	08	03	201	07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	150 Keluarga	200.000.000	APBD	150 Keluarga	50.000.000
2	08	03	201	08	Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah Kemandirian Usaha Pangan Masyarakat dan Taku Tani Indonesia yang Didukung	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	4 Laporan	0	APBD	4 Laporan	100.000.000
2	08	03	201	09	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	100.000.000	APBD	1 Laporan	100.000.000
2	08	03	201	10	Pengembangan Kemandirian Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kemandirian Distribusi Pangan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	5 Unit	400.000.000	APBD	5 Unit	100.000.000
2	08	03	201	11	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	12 Dokumen	0	APBD	12 Dokumen	50.000.000
2	08	03	201	12	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	12 Laporan	40.000.000	APBD	12 Laporan	60.000.000
2	08	03	201	13	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen	0	APBD	1 Dokumen 150.000.000	40.000.000

2	09	03	201	14	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Stok Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	0	APBD	100	30.000.000
2	09	03	201	15	Penentuan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	12 Dokumen	0	APBD	100	30.000.000
2	09	03	201	16	Penyusunan Rencana Bahan Makanan (RBM)	Informasi Rencana Bahan Makanan (RBM)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen	20.000.000	APBD	100	30.000.000
2	09	03	202		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				1.200.000.000			775.000.000
2	09	03	202	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	0	APBD	100	25.000.000
2	09	03	202	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen	0	APBD	100	25.000.000
2	09	03	202	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	80 ton	1.130.000.000	APBD		700.000.000
2	09	03	202	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	80 ton	0	APBD		25.000.000
2	09	03	202	05	Penyusunan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah penyusunan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	80 ton	100.000.000	APBD		100.000.000
2	09	03	204		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	skor pola pangan harapan			175.000.000			285.000.000
2	09	03	204	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen	0	APBD	100	110.000.000
2	09	03	204	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	150.000.000	APBD	100	150.000.000
2	09	03	204	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	25.000.000	APBD		25.000.000
2	09	04			Program Pemasokan Karyawan Pangan	Budaya kerja pangan rawan pangan			300.000.000			89.500.000
2	09	04	201		Kegiatan Penyusunan Pola Ketersediaan dan Ketersediaan Pangan Kecamatan	Tersedianya disposisi ketahanan pangan dan pola ketahanan dan ketersediaan pangan			50.000.000			49.500.000
2	09	04	201	01	Penyusunan, Pemeliharaan dan Analisis Pola Ketersediaan dan Ketersediaan Pangan	Peta dan Analisis Ketersediaan dan Ketersediaan Pangan yang Dimutakhirkan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen	50.000.000	APBD	0 Dokumen 1 Dokumen	49.500.000
2	09	04	202		Kegiatan Penanganan Karyawan Pangan Kecamatan Kabupaten/Kota	Jumlah daerah rawan pangan yang ditangani			250.000.000			40.000.000

2	09	04	202	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kawasan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kawasan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen	0	APBD	1 Dokumen 50 Ton 0 Dokumen	40.000.000
2	09	04	202	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kawasan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kawasan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	0	APBD	1 Dokumen 0 Laporan 12 Bulan	25.000.000
2	09	04	202	04	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen	250.000.000	APBD	1 Dokumen 0 Laporan 12 Bulan	250.000.000
2	09	04	202	05	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen	0	APBD	1 Dokumen 0 Laporan 12 Bulan	30.000.000
2	09	05			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Regulasi PSAT (nirlas)			80.000.000			120.000.000
2	09	05	201		Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Sektor Pangan Kabupaten/Kota	Rekomendasi sertifikat prima			80.000.000			120.000.000
2	09	05	201	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Sektor Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi sertifikat prima yang diterbitkan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	5 Dokumen	180.000.000	APBD	6 Dokumen	80.000.000
2	09	05	201	05	Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Sektor Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Sektor Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	5 Dokumen	0	APBD	0 Dokumen 7 Dokumen	40.000.000
2	09	05	201	08	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Laporan	20.000.000	APBD	0 Dokumen 7 Dokumen	25.000.000
					URUSAN PILIHAN				2.535.000.000			
					URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				2.535.000.000			6.875.000.000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap			880.000.000			3.400.000.000
3	25	03	201		Pengelolaan Pemangkuhan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dilusahkan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemangkuhan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dilusahkan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000			25.000.000
3	25	03	201	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	12 Dokumen	20.000.000	APBD	0 Dokumen 12 Bulan	25.000.000
3	25	03	202		Kegiatan Pembudayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penggiatan Nelayan Kecil dan Pembinaan Kapasitasnya			860.000.000			3.375.000.000
3	25	03	202	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	130 orang	800.000.000	APBD	130 orang	3.300.000.000
3	25	03	202	02	Pelaksanaan Fasilitas Pemenuhan dan Pengembangan Kolaborasi Nelayan Kecil	Jumlah Kolaborasi Nelayan Kecil yang Dilakukan Pemenuhan dan Pengembangan Kolaborasinya	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	40 Kelompok	30.000.000	APBD	40 Kelompok	50.000.000

3	25	03	202	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kontribusi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Dikawatir Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kontribusi Usaha	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	28 Unit Usaha	30.000.000	APBD		28 Unit Usaha	25.000.000
3	25	03	203	02	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	0 Layanan 1 Paket	0	APBD		0 Layanan 1 Paket	0
3	25	03	203	02	Penyusunan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	0 Layanan 1 Paket	0	APBD		0 Layanan 1 Paket	0
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produk Budaya Perikanan			1.300.000.000				3.125.000.000
3	25	04	202	01	Pembudayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	30 Kelompok	300.000.000	APBD		0 Rekomenda 1 Dokumen	1.350.000.000
3	25	04	202	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kemampuan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kemampuan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	30 Kelompok	30.000.000	APBD		0 Rekomenda 1 Dokumen	50.000.000
3	25	04	202	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Baru Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Mengembangkan Pendampingan, Kemudahan Akses Baru Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	8 Kelompok	150.000.000	APBD		0 Rekomenda 1 Dokumen	50.000.000
3	25	04	204		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produk Budaya Perikanan			880.000.000				1.775.000.000
3	25	04	204	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	12 Dokumen	20.000.000	APBD		0 Dokumen 12 Bulan	25.000.000
3	25	04	204	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	5 Paket	320.000.000	APBD		12 Bulan 7 Paket	1.250.000.000
3	25	04	204	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terjadi Masalah Pengobatan Kesehatan Ikan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen	250.000.000	APBD		0 Dokumen 7 Kuartal	150.000.000
3	25	04	204	09	Penjagaan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	6 unit	0	APBD		1 unit	50.000.000
3	25	04	204	10	Pembinaan dan Peningkatan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memeroleh Pembinaan dan Peningkatan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	30 Orang	20.000.000	APBD		30 Orang	50.000.000
3	25	04	204	12	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Peningkatan Limas untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Limas Limas untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Dicanangkan, Ditempatkan, Diumatikan dan Ditempatkan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	1 Dokumen	270.000.000	APBD		30 Orang 0 Orang	250.000.000
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Tambahan Produk Hasil Perikanan			285.000.000				350.000.000
3	25	06	201		Kegiatan Pencariban Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Data usaha pemrosesan dan pengolahan hasil perikanan			25.000.000				50.000.000

3	25	06	201	06	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaan dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaan dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	12 Dokumen	25.000.000	APBD	7 kali 0 Dokumen 12 Bulan	50.000.000
3	25	06	202		Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaan Skala Mikro dan Kecil	Terbentuknya sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)			40.000.000			150.000.000
3	25	06	202	02	Pembinaan terhadap Peningkatan Peningkatan Perikanan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaan Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaan Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan, termasuk Peningkatan Peningkatan Perikanan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaan Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	8 Unit Usaha	40.000.000	APBD	15 Kecamatan 0 Unit Usaha	150.000.000
3	25	06	203		Kegiatan Penyediaan dan Penyakuran Bahan Bakar Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya angka konsumsi ikan			200.000.000			150.000.000
3	25	06	203	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan	60 Pelaku Usaha	200.000.000	APBD	200 Orang 0 Pelaku Usaha 1 Paket	150.000.000
									11.934.227.390			16.235.992.390

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan dan Pangan

Rencana Program Dinas Perikanan dan Pangan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan. Rencana ini selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perikanan dan Pangan. Kegiatan yang dipilih diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran dan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan atau jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan.

Sumber dari pendanaan ini berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan Dana Alokasi Khusus Bidang Perikanan.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan dan Pangan dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

TABEL 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4
	URUSAN PERIKANAN DAN PANGAN		11.934.227.390
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB		9.399.227.390
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		9.399.227.390
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Sakip Dinas Pangan oleh Inspektorat	6.744.227.390

						Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	
2	09	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100.000.000
2	09	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.000.000
2	09	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0
2	09	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0
2	09	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0
2	09	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0
2	09	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0
2	09	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000
2	09	01	202		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	4.800.000.000
2	09	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.550.000.000
2	09	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	230.000.000
2	09	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000
2	09	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	0
2	09	01	203		Kegiatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		25.000.000
2	09	01	203	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	25.000.000
2	09	01	205		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		90.000.000
2	09	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40.000.000
2	09	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50.000.000
2	09	01	206		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	674.027.390
2	09	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40.000.000
2	09	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	200.000.000
2	09	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10.000.000
2	09	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45.000.000
2	09	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	28.627.390
2	09	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5.400.000
2	09	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000
2	09	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000
2	09	01	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	35.000.000

2	09	01	207		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	300.200.000
2	09	01	207	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-
2	09	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	200.000
2	09	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	250.000.000
2	09	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50.000.000
2	09	01	208		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD Dinas Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Pangan	270.000.000
2	09	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	120.000.000
2	09	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	150.000.000
2	09	01	209		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	485.000.000
2	09	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60.000.000
2	09	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	250.000.000
2	09	01	209	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0
2	09	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25.000.000
2	09	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150.000.000
2	09	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Keadaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan	40.000.000
2	09	02	201		Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Masyarakat	40.000.000
2	09	02	201	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	0
2	09	02	201	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	0
2	09	02	201	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	0
2	09	02	201	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	40.000.000
2	09	02	201	05	Penyusunan Rencana dan Peta jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	0
2	09	02	201	06	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	0
					Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Konsumsi energi	2.235.000.000
2	09	03	2.01		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	830.000.000
2	09	03	201	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	0
2	09	03	201	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	45.000.000
2	09	03	201	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	25.000.000
2	09	03	201	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	0

2	09	03	201	07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	200.000.000
2	09	03	201	08	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	0
2	09	03	201	09	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	100.000.000
2	09	03	201	10	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	400.000.000
2	09	03	201	11	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	0
2	09	03	201	12	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	40.000.000
2	09	03	201	13	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	0
2	09	03	201	14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	0
2	09	03	201	15	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	0
2	09	03	201	16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	20.000.000
2	09	03	202		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		1.230.000.000
2	09	03	202	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	0
2	09	03	202	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	0
2	09	03	202	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.130.000.000
2	09	03	202	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	0
2	09	03	202	05	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	100.000.000
2	09	03	204		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	skor pola pangan harapan	175.000.000
2	09	03	204	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	0
2	09	03	204	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	150.000.000
2	09	03	204	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	25.000.000
2	09	04			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Berkurangnya nagan rawan pangan	300.000.000
2	09	04	201		Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya database ketahanan pangan dan peta ketahanan dan kerentanan pangan	50.000.000
2	09	04	201	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	50.000.000
2	09	04	202		Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah daerah rawan pangan yang ditangani	250.000.000
2	09	04	202	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0
2	09	04	202	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	0
2	09	04	202	04	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	250.000.000
2	09	04	202	05	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	0
2	09	05			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Registrasi PSAT (beras)	80.000.000
						Rekomendasi sertifikat prima	

2	09	05	201		Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah registrasi PSAT (Beras) dan rekomendasi sertifikat prima yang diterbitkan	80.000.000
2	09	05	201	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	60.000.000
2	09	05	201	05	Rekomendasi Pertanian Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	0
2	09	05	201	08	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	20.000.000
					URUSAN PILIHAN		2.535.000.000
					URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		2.535.000.000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	880.000.000
3	25	03	201		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Disusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		20.000.000
3	25	03	201	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	20.000.000
3	25	03	202		Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kelas KUB dan Pembinaan	860.000.000
3	25	03	202	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	800.000.000
3	25	03	202	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	30.000.000
3	25	03	202	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	30.000.000
3	25	03	203		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		0
3	25	03	203	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan	1.390.000.000
3	25	04	202		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		510.000.000
3	25	04	202	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	300.000.000
3	25	04	202	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	30.000.000
3	25	04	202	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	180.000.000
3	25	04	204		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan	880.000.000
3	25	04	204	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000
3	25	04	204	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	320.000.000
3	25	04	204	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	250.000.000
3	25	04	204	09	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0
3	25	04	204	10	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	20.000.000
3	25	04	204	12	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	270.000.000

3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	265.000.000
3	25	06	201		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Data usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	25.000.000
3	25	06	201	05	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	25.000.000
3	25	06	202		Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terbentuknya sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)	40.000.000
3	25	06	202	02	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	40.000.000
3	25	06	203		Kegiatan Penyediaan dan Penyaturan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya angka konsumsi ikan	200.000.000
3	25	06	203	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	200.000.000
							11.934.227.390

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 telah memperhatikan prioritas pembangunan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sumatera Barat, pokok – pokok pikiran DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, serta aspirasi masyarakat dan stakeholder dalam forum Diskusi Kelompok terbatas dan Musrenbang

Catatan penting dalam Rencana Kerja Tahun 2025 yang perlu diperhatikan adalah bahwa pembangunan pada urusan pangan dan perikanan diarahkan pada upaya:

1. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan
2. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
3. Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan
4. Peningkatan Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perikanan dan Pangan

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh pejabat struktural di Dinas Perikanan dan Pangan agar mengawal pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2025 sebaik-baiknya, sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Seluruh unsur di Dinas Perikanan dan Pangan agar melaksanakan program dan kegiatan Rencana Kerja tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan fungsinya, melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Skala prioritas dalam rasionalisasi anggaran baik program/ kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

- 2025 selalu disinergiskan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Perlunya dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2025 agar program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja tahun 2025 dapat dipastikan berjalan dengan baik.
 5. Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Pangan dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru / kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dokumen Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, guna mendukung indikator yang telah ditetapkan sebagai target yang harus dicapai.

Untuk implementasi Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Pangan tersebut dibutuhkan komitmen yang tinggi, kerjakeras, dedikasi, loyalitas dan integritas dari seluruh jajaran Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 diharapkan mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Painan, 8 Juli 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESIR SELATAN



FIRDAUS, S.Pi. M.Si
NIP. 19700621 199303 1 006

